



Judul : Jaksa Agung dan Kapolri didesak transparan
Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Jaksa Agung dan Kapolri Didesak Transparan

Persoalan di antara dua lembaga itu kian menunjukkan banyaknya masalah pada penegakan hukum di Indonesia. Negara harus mengevaluasi.

YAKUB PRYATAMA WIJAYAATMJA
yakub.p@mediaindonesia.com

KEJAKSAAN Agung RI dan Kepolisian RI (Polri) didesak segera memberi penjelasan gamblang kepada publik terkait dengan kabar perseteruan di antara kedua

Densus 88 Antiteror Polri di sebuah restoran di Cipete, Jakarta Selatan, pekan lalu. Anggota Densus 88 itu kemudian ditangkap pengawal Febrie dari satuan Polisi Militer.

Di masyarakat sudah berasar isu liar bahwa pembunuhan tersebut ada kaitannya dengan kasus korupsi timah

lembaga tersebut. Penjelasan resmi, terbuka, dan tidak ditutup tutupi harus segera diinformasikan sehingga tidak muncul asumsi asumsi liar di masyarakat.

"Kalau rumor itu liar, upaya pemberantasan korupsi akan terganggu dan yang senang ialah koruptor. Karena itu, perlu ada segera penjelasan resmi baik dari pihak Kejaksaan Agung maupun ke polisian," ungkap anggota Komisi III DPR RI, Johan Budi, kemarin.

Sebelumnya beredar kabar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Adriansyah, dibututti anggota

yang tengah ditangani Kejaksaan. Desas-desus itu muncul karena Febrie saat ini sedang memimpin penyelidikan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Thk.

Namun, hingga kemarin, belum ada keterangan resmi perihal peristiwa penguntitan itu dan alasan apa yang mendasari anggota Densus 88 membuntuti JAM-Pidsus. Yang ditunjukkan ke publik justru sikap keakraban antara Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Seolah-olah

mereka ingin menunjukkan tidak ada masalah di antara kedua institusi itu.

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menyebut keserasan kedua pimpinan lembaga itu tidaklah cukup. Mereka harus tetap bertanggung jawab menjelaskan isu penguntitan tersebut kepada publik. "Kita tetap membutuhkan penjelasan dari hasil pertemuan tersebut dan juga apa yang terjadi, daripada nanti banyak spekulasi yang beredar liar yang tidak tepat," ucap Tobias, sapaan akrabnya.

Ia pun menilai, secara nalar publik, sikap pimpinan lembaga itu tidak tepat. "Dalam

Kronologi Densus 88 Buntuti JAM-Pidsus

(Minggu, 19 Mei 2024)

- Pukul 20.00-21.00 WIB Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Adriansyah makan malam di sebuah restoran di Cipete, Jakarta Selatan.
 - Dua orang, di antara anggota kepolisian dari Dinasemen Khusus Antiteror (Densus) 88 dengan menggunakan masker dan pakai santa, mengeluarkan alat perekam yang diarahkan ke ruangan tempat Febrie berada.
 - Gerak-gerik dua orang itu menimbulkan ketegangan antara Polisi Militer yang mengawal Febrie. Polisi Militer itu merangkul salah seorang berinisial Bripka IM, sedangkan rekannya kabur.
- Kasus Besar yang Ditangani JAM-Pidsus Kejagung**
- Kasus PT Timah Thk periode 2015-2022, yang menyeret Harvey Moelis dan Helena Lim.
 - Kasus jual beli emas ilegal yang menyeret pengusaha Surabaya Budi Said dengan PT Antam.
 - Kasus proyek pembangunan jalur kereta api (KA) Besitang-Langsa, Sumatra Utara, oleh Balai Teknik Pekerjaan Apian Mecian periode 2017-2019.
 - Kasus korupsi importasi gula PT Sumber Mutara Indah Perdana (SMIP) periode 2020-2023.
 - Kasus PT Asuransi Jiwa Rayaya (Persero) terkait pengelolaan keuangan serta dana investasi saham dan reksa dana periode 2008-2018.

Sumber: JAM-Pidsus Kejaksaan Tinggi MI

konteks nalar publik, pertanggungjawaban organisasi harus dikemukakan karena transparansi yang seharusnya jadi ranah publik ini tidak terjawab," tegasnya.

Akui simpang siur

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan hakal berbicara langsung dengan Jaksa Agung dan Kapolri untuk membahas persoalan itu. Ia mengakui kabar penguntitan tersebut masih simpang siur, tetapi secara umum hubungan kedua lembaga masih baik.

"Ya mungkin berita itu simpang siur saja, tetapi yang jelas begini loh, kita melihat secara umum saja, aman. Tidak ada apa-apa," ucapnya.

Jawaban serupa juga dilontarkan Kapolri Listyo Sigit saat didesak wartawan se usai mendampingi Presiden Jokowi di acara GP Ansor, kemarin. Ia hanya herkom-

tar singkat, "Kan dengan Pak Jaksa Agung sudah sama-sama enggak ada masalah. Memang enggak ada masalah apa-apa."

Sementara itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSERT) Bamhang Rukminto menilai persoalan yang terjadi di antara dua institusi penegakan hukum itu malah menunjukkan banyaknya masalah yang terjadi di penerapan hukum Indonesia.

"Fenomena itu membuka banyak hal terkait problematika penegakan hukum kita. Hal seperti itu harus segera dievaluasi oleh negara," tandas Bamhang. (Dis/Try/Fik/X-3)